

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

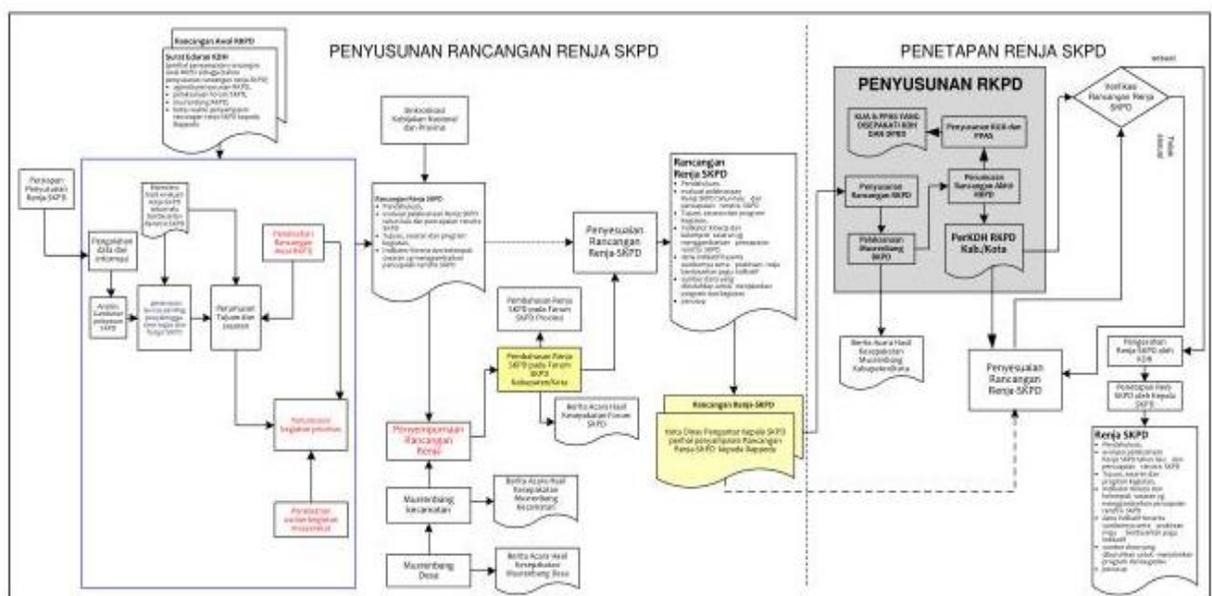
#### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
3. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota**

Sumber Data : Permendagri 86/2017

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
  - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
  - Orientasi mengenai Renja
  - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja

- Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## 2. Penyusunan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
- Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- Telaah terhadap rancangan RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
- Penyempurnaan rancangan kerja PD
- Pembahasan forum PD
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

## 3. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

## 4. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

## 5. Penetapan Renja

Pada perencanaan tahun 2023 ini telah dirintis penggunaan aplikasi SIPD dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023. Implementasi aplikasi SIPD merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Adapun Agenda Kerja yang telah dilalui dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMPTSP Kab. Purworejo  
Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1.	Persiapan Penyusunan	Minggu ke-1 Januari 2022
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Minggu ke-2 Januari 2022
3.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Februari 2022
4.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Minggu ke-1 Maret 2022
5.	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Maret 2022
6.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Juli 2022
7.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Juli 2022
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Akhir Juli 2022

### **1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2016 – 2023 dan mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
  16. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo ( lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8 );
  17. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
  18. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44).
  19. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026
  20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 (seri E Nomor 34).
  21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.
4. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2023.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2023.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.

5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penulisan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja.

##### **BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

##### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Renja tahun lalu atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Purworejo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan nilai investasi</b>	<b>2%</b>	<b>74%</b>	<b>2%</b>	<b>74%</b>	<b>3700</b>	<b>99,5 %</b>	<b>8.67%</b>	<b>8.71</b>
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelaksanaan Promosi CJIBF, Pelaksanaan Pameran di Jawa , Pelaksanaan Pameran Purworejo Expo, Mengikuti kegiatan pendukung pameran dan kerjasama investasi, Audio Visual Potensi dan Profil Investasi</b>								
Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Pelaksanaan Promosi CJIBF, Pelaksanaan Pameran di Jawa ,	2%	74%	2%	74%	3700	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Pameran Purworejo Expo, Mengikuti kegiatan pendukung pameran dan kerjasama investasi, Audio Visual Potensi dan Profil Investasi								
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cetak Stopmap Kop Dinas, Peninjauan lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda izin, Rakor Tim, Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat, Jasa Perorangan.</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Cetak Stopmap Kop Dinas, Peninjauan lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda izin, Rakor Tim,	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	2500 Pelaku Usaha	1250 Pelaku Usaha	50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat, Jasa Perorangan.								
Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev, Jasa Perseorangan, Focus Group Discussion, Rapat Tim	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100
Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan	Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan, Pelayanan Pengaduan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	20 Orang	20 Orang	100
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan nilai investasi</b>	<b>2%</b>	<b>74%</b>	<b>2%</b>	<b>74%</b>	<b>3700</b>	<b>100%</b>	<b>8.67%</b>	<b>8.67</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Operasional Klinik Investasi, Koordinasi PM,</b>								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Forum Pengembangan PM</b>								
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Operasional Klinik Investasi, Koordinasi PM, Forum Pengembangan PM	12 bulan, 1 kali.	12 bulan, 1 kali.	12 bulan, 1 kali.	12 bulan, 1 kali.	100	249 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	48.19
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Jumlah Perizinan yang Dilayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100</b>
<b>Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan, Pemeliharaan Arsip, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),</b>								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pembayaran Jasa Pihak ketiga.</b>								
Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan, Pemeliharaan Arsip, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pembayaran Jasa Pihak ketiga.	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	4 Dokumen	2 Dokumen	50
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Layanan belanja pegawai</b>								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan belanja pegawai	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	100%	50%	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100	24 Laporan	12 Laporan	50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan</b>								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan surat menyurat dan kearsipan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	8 unit/tahun , 1 orang	8 unit/tahun , 1 orang	8 unit/tahun , 1 orang	8 unit/tahun , 1 orang	100	8 Unit	5 Unit	70
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 unit/Tahun	7 unit/Tahun	7 unit/Tahun	7 unit/Tahun	100	80 unit	50 unit	70
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	905 Unit	200 Unit	22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	10 OH	10 OH	10 OH	10 OH	100	20 Orang	20 Orang	100
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	16 Dokumen	8 Dokumen	50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen data dasar pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Capaian kinerja Program dan kegiatan tahun 2021 rata – rata mencapai 97 %. Tingkat capaian tersebut berdasarkan realisasi program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Pada Capaian kinerja Program dan kegiatan tahun 2022 sampai triwulan II ada beberapa program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih dibawah 90% yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah hal ini disebabkan karena adanya pergeseran pada rincian belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 ( empat puluh empat ) Perizinan yang dilayani yaitu :

<b>NO</b>	<b>NAMA IZIN</b>
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
4	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
5	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
6	IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI
7	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
8	IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
9	IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
10	IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
11	IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
12	IZIN JAGAL HEWAN
13	IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
14	IZIN LINGKUNGAN
15	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
16	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
17	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
18	IZIN REKLAME
19	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
20	IZIN OPERASIONAL PANTI
21	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
22	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
23	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
23	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
24	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

25	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
26	IZIN OPERASIONAL KLINIK
27	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
28	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
29	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
30	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
31	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
32	SIK-ALM(IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEGNOLOGI LABOLATORIUM MEDIK)
33	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
34	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
35	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
36	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
37	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
38	ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
39	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
40	IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
41	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK)
42	IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS)
43	IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
44	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL)

Dalam melaksanakan pelayanan, DINPMPTSP telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan Perizinan (SPP),

dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh stakeholder sehingga secara penyelenggaraan pelayanan peizinan menjadi transparan dan akuntable. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C. 30.

**TABEL 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2021 (thn n-2)	Th. 2022 (thn n-1)	Th. 2023 (thn n)	Th. 2024 (thn n+1)	Th. 2021 (thn n-2)	Th. 2022 (thn n-1)	Th. 2023 (thn n)	Th. 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			2%				86,63%				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik			100%				96%				
3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi		v	2%				74%				
4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi		v	2%				74%				
5	Persentase Jumlah Perizinan yang dilayani		v	100%				100%				
6	Persentase Tertanganinya Permin taan Data		v	100%				100%				
7	Cakupan Layanan belanja pegawai		v	100%				100%				
8	Persentase Peningkatan Nilai Investasi				10%	10%	10%			10%	10%	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				88	88	88			88	88	
10	Realisasi Penanaman Modal				67,65 M	74,42 M	81,86 M		21 M	74,42 M	81,86 M	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				88	88	88		88	88	88	
12	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal		v		5%	5%	5%		50%	5%	5%	
13	Persentase Nomor Induk Berusaha Yang Terbit Terhadap Jumlah Kepeminatan		v		99,50%	99,5 %	99,50%		50%	99,5 %	99,50%	
14	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Standar Prosedur Dan Kriteria		v		100%	100%	100%		50%	100%	100%	
15	Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk		v		100%	100%	100%		50%	100%	100%	
16	Persentase Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Disediakan		v		100%	100%	100%		50%	100%	100%	
17	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		v		100%	100%	100%		50%	100%	100%	

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

##### **KEKUATAN (S):**

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- b. Adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SI IDA);
- d. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;

##### **KELEMAHAN (W):**

- a. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
- b. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

#### 2. Lingkungan Eksternal

##### **PELUANG (O):**

- a. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
- b. Teknologi informasi berkembang pesat;

- c. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
- d. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

**ANCAMAN (T):**

- a. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
- b. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;
- d. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus langsung perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
- e. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang investasi;
2. Belum optimalnya sinergitas OPD terkait dalam mendukung pengembangan iklim investasi.

#### **2.4 Review terhadap RKPD**

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil identifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.3  
Reviu terhadap RKPD tahun 2023

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal</b>	<b>5%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal</b>	<b>5%</b>	<b>193.611.500</b>	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		Jumlah		100.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibi dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal		193.611.500	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Kepeminatan	1 Naskah Akademik	100.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Regulasi mengenai Pemberian Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Naskah Akademik	193.611.500	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan</b>	<b>99,50%</b>	<b>311.387.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PE NANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan</b>	<b>99,50%</b>	<b>164.366.200</b>	

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal		311.387.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal		164.366.200	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	54.605.600,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jawa dan Luar Jawa	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten	4 Event	211.387.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jawa dan Luar Jawa	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten	4 Event	109.760.600	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan</b>	<b>1</b>	<b>179.683.200</b>	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan		700.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan		179.683.200	

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Pelayanan Perizinan	4 Kali	350.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Pelayanan Perizinan	4 Kali		
		Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat,	1 Paket				Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat,	1 Paket		
		Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan					Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan			
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Hasil Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM	1 Dokumen	250.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Hasil Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM	1 Dokumen	122.235.900	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Purworejo	Hasil Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Purworejo	Hasil Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	11.493.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Purworejo	Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Purworejo	Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi	1 Dokumen	18.685.500	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persen tasee Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK</b>	<b>100%</b>	<b>208.200.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persen tasee Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK</b>	<b>1</b>	<b>338.590.168</b>	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal		208.200.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal		338.590.168	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Tersedianya Informasi Profil Hasil Pemantauan, Dokumen LKPM, dan Notula Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	12 Bulan	50.820.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Tersedianya Informasi Profil Hasil Pemantauan, Dokumen LKPM, dan Notula Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	12 Bulan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	4 kali.	67.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	4 kali.	322.689.076	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	12 Bulan	90.380.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	12 Bulan	15.901.092	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan</b>	<b>1</b>	<b>82.562.600</b>	

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi		300.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi		82.562.600	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	274.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	82.562.600	
		Pemeliharaan Aplikasi Perizinan	12 Bulan	20.000.000			Pemeliharaan Aplikasi Perizinan	12 Bulan		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kabupaten Purworejo</b>	<b>Cakupan Layanan belanja pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>3.415.204.868</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Purworejo</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>3.215.362.016</b>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.922.939.868	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.723.097.016	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	2.900.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	2.700.157.148	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.014.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.014.400	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	18.911.068	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	18.911.068	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	2.014.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	2.014.400	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 bulan	219.921.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 bulan	219.921.400	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Surat Menyurat	12 bulan	24.963.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Surat Menyurat	12 bulan	24.963.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	176.345.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	176.345.700	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	18.612.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	18.612.200	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	142.000.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	142.000.400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	142.000.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	142.000.400	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3 Jenis	75.408.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	3 Jenis	75.408.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	25.408.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	25.408.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	50.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	29.009.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	29.009.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	29.009.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	29.009.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	25.926.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	25.926.200	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	6.096.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	6.096.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.871.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.871.500	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.817.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.817.500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		DPA-SKPD	1 dokumen	2.205.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		DPA-SKPD	1 dokumen	2.205.600	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.300	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	3.621.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	3.621.300	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.314.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.314.000	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang – undang yang mengatur tentang prinsip- prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

#### **3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

Arah kebijakan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Prioritas Penanaman Modal sektor pangan, infrastruktur, energi dan Green Investment;
4. Membangun kemitraan Penanaman Modal Usaha Besar dengan K-UMKM.

Dengan Strategi kebijakan Penanaman Modalnya yaitu :

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;

3. Penguatan Task Force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

### 3.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	74,415 M
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

### 3.4. Program dan Kegiatan

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada Tabel 3.2.















### **3.5. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2023 sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

#### **1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 5% yang difokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan iklim penanaman modal.

#### **2. Program Promosi Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ijin usaha dan/atau izin komersial/ izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan promosi.

#### **3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) sebesar 100% yang difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP, penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall

Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik
2. Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.
3. Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

#### **4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan sebesar 100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan penanaman modal.

#### **5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi sebesar 100%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan aplikasi perizinan selama 12 bulan. Rencana program dan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF (Rp.)</b>	<b>PD / KET.</b>
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	193.611.500	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	103.137.900	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	332.097.600	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	369.818.468	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	82.562.600	DPMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.215.362.016	DPMPTSP

TABEL 4.2  
SASARAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

<b>N O</b>	<b>PRGRAM/KEGIATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal</b>
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Terbitnya Nomor Induk Berusaha</b>
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal

<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Standar Prosedur Dan Kriteria</b>
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk</b>
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Tersedianya Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan</b>
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Renstra perangkat daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2023, ada beberapa program kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Program Promosi Penanaman Modal Dan Program Pelayanan Penanaman Modal dimana pada Program Promosi Penanaman Modal terdapat kegiatan untuk mendukung promosi penanaman modal guna menarik minat investor untuk berinvestasi di kabupaten purworejo. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat kegiatan Gebyar Pelayanan Perizinan dimana kegiatan ini sangat memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rancangan Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 20 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO

  
**AGUNG WIBOWO, AP.,MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740308 199311 1 002